

Analisis Kerjasama Penanganan Pengungsi Uni Eropa-Turki Pasca Runtuhnya Rezim Ba'ath Suriah

Ryvo D'Novaliano
Universitas Sriwijaya
dnovaliano@gmail.com

Abstract - Conflict-induced immigration has long been a humanitarian crisis not only in the countries where conflicts occur, but also in neighboring countries where refugees are fleeing. The Arab Spring uprisings spread to Syria, prompting demonstrations that were responded to excessively by security forces. Armed military forces were deployed to contain the wave of protests against the government, using repressive measures that resulted in the loss of many lives. The protests quickly spread across Syria and transformed into a civil war with external parties intervening. In a dangerous conflict situation, the Syrian population began to migrate out of the country. Turkey became the main destination for refugees as a place to stay and a stopover route before going to Europe. The wave of migration caused a refugee crisis in the European Union. Finally, the European Union took a step to cooperate in handling refugees with Turkey, the refugees will be placed in Turkey, while the European Union will reconsider Turkey's membership in the organization and provide financial assistance. The end of the Ba'ath party's rule in Syria signaled the end of the prolonged civil war and paved the way for refugees to return to their home countries. This will certainly affect the cooperation between Turkey and the European Union as the refugee crisis in the country decreases.

Key words: Turkey, European Union, Refugee Crisis

Abstrak - Imigrasi akibat konflik sudah lama menimbulkan krisis kemanusiaan. Tidak hanya di negara tempat konflik terjadi, namun di negara-negara lain yang bersebelahan maupun menjadi tujuan pelarian para pengungsi. Gerakan revolusi musim semi arab menyebar hingga ke Suriah, mendorong aksi demonstrasi yang direspon dengan berlebihan oleh pasukan keamanan. Militer bersenjata dikerahkan untuk menaham gelombang protes terhadap pemerintah, mereka menggunakan tindakan represif yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Dengan cepat protes menyebar ke seluruh Suriah dan bertransformasi menjadi perang saudara dengan campur tangan pihak-pihak eksternal. Dalam situasi konflik berbahaya, penduduk Suriah mulai melakukan migrasi keluar negara tersebut. Turki menjadi tujuan utama bagi para pengungsi sebagai tempat menetap maupun jalur singgah sebelum ke eropa. Gelombang migrasi menyebabkan krisis pengungsi di Uni Eropa.

Akhirnya Uni Eropa mengambil langkah melakukan kerja sama penanganan pengungsi dengan Turki, para pengungsi akan di tempatkan di Turki sementara Uni Eropa akan mempertimbangkan kembali keanggotaan Turki di organisasi tersebut dan memberikan bantuan dana. Berakhirnya kekuasaan partai Ba'ath di Suriah menandakan berakhirnya perang saudara berkepanjangan dan membuka jalan bagi para pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kerjasama yang ada di antara Turki-Uni Eropa akibat menurunnya krisis pengungsi di negara tersebut.

Kata kunci: Turki, Uni Eropa, Krisis Pengungsi

I. PENDAHULUAN

Terletak di dua benua, Eropa dan Asia. Turki merupakan negara sekuler dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Negara ini bersinggungan dengan benua Eropa di utara dan Asia di selatan. Letak geografis nya memberikan keuntungan geopolitik bagi negara ini. Kepemilikan atas selat Boporus yang strategis memisahkan bagian wilayah negara tersebut, Eropa di utara dan Asia di selatan negara tersebut, selat ini menjadi jalur yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Mamara, dan kemudian Laut Mediterania. Sehingga negara ini memiliki sebuah daya tawar yang besar juga vital bagi negara-negara di Asia Tengah dan Eropa Timur yang ingin melakukan aktivitas internasional melalui lautan seperti perdagangan dan lainnya.

Letak geografis Turki tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal geopolitik. Namun, letak nya yang berada di antara dua benua sering kali menjadikan Turki sebagai tempat yang dilalui dalam mobilitas internasional. Salah satu jenis mobilitas internasional yang menjadi masalah adalah pergerakan imigran internasional. Kegiatan imigrasi internasional biasanya dilakukan oleh penduduk suatu negara yang ingin mencari kehidupan lebih lebih layak, atau sekadar mencari perlindungan. Seseorang yang terpaksa pergi melarikan diri dari situasi konflik atau penganiayaan dan telah melintasi perbatasan internasional untuk mencari keselamatan. Tidak memungkinkan bagi mereka kembali ke negara asalnya tanpa mempertaruhkan nyawa atau kebebasan mereka.

Mereka disebut sebagai Pengungsi, ini adalah istilah hukum yang mengandung perlindungan tertentu yang menjadi hak para pengungsi (UNHCR, 2024).

Bukan menjadi suatu hal yang baru, Turki sejak masa Perang Dunia II sudah menjadi tempat singgah para pengungsi dari Eropa. Perang yang berlangsung di seluruh Eropa mendorong gelombang pengungsian ke Amerika dan Asia. Mereka yang melarikan diri ke Asia, terutama Timur-Tengah, biasanya melewati wilayah Turki. Perang Dunia II menyebabkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar di negara-negara yang perbatasannya relatif stabil (Judt, 2005: 27). Perpindahan masif ini biasanya menggambarkan skala krisis kemanusiaan yang dihadapi Eropa setelah Perang Dunia II. Tentu saja, jumlah korban jiwa yang disebabkan oleh perang tersebut sangat mengerikan, lebih dari 60 juta orang, termasuk militer dan warga sipil menjadi korban berdasarkan perkiraan mayoritas ahli.

Beberapa dekade berlalu pasca Perang Dunia II. Negara-negara Eropa mengalami kemajuan yang pesat, terutama di Eropa Barat. Tentu, salah satu faktor kemajuan ini adalah cepatnya langkah yang diambil Amerika Serikat guna menyusun rencana pemulihan di bawah *Marshall Plan* yang menjadi pemicu integrasi Eropa. Selama Perang Dingin, meski terdapat ketegangan, negara-negara Eropa menunjukkan progres yang signifikan dalam hal kerja sama regional. Setelah peristiwa runtuhnya Tembok Berlin, kemudian disusul runtuhnya Uni Soviet. Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) bertransformasi menjadi sebuah organisasi regional Uni Eropa. Termasuk melakukan perluasan keanggotaan ke negara Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Akan tetapi, Turki sebagai negara yang terletak sebagian wilayahnya di kontinen Eropa, belum diterima menjadi anggota Uni Eropa.

Dimulai sejak penghujung tahun 2010, Timur Tengah dihadapkan sebuah fenomena pergolakan politik yang dikenal dengan istilah *Arab Spring*. Revolusi ini bertujuan untuk menumbangkan rezim otoriter menggantikannya dengan sistem demokrasi. Di Suriah yang merupakan salah satu negara mengalami Arab Spring, fenomena ini dikenal juga dengan *Jasmine Revolution*. Arab Spring di Suriah berawal dari adanya konflik di dalam negeri, terjadi sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di Daraa (Starr, 2012). Pada bulan Maret di tahun tersebut, sebanyak 15 pelajar berusia kisaran 9-15 tahun membuat grafiti slogan-slogan anti-pemerintah di tembok tembok kota (Sulaeman Y.D, 2014). Konflik berkepanjangan mengakibatkan gelombang pengungsian penduduk Suriah ke luar negeri, dengan Turki menjadi negara tujuan utama mayoritas pengungsi tersebut.

Pengungsi di Turki tidak hanya berasal dari Suriah, tetapi juga dari beberapa negara lainnya di Timur-Tengah. Dan terbagi dalam jenis. Pertama, pengungsi yang hanya menetap sementara waktu untuk memperoleh perlindungan suaka dan nantinya akan kembali ke negara asal ketika kondisi sudah memungkinkan. Kedua, pengungsi yang datang ke Turki sebagai tempat transit untuk melanjutkan perjalanan mereka ke negara-negara Eropa atau Asia (Rosyana & Dermawan 2020). Gelombang pengungsi yang semakin bertambah juga menimbulkan permasalahan di negara Uni Eropa. Hal tersebut akhirnya mendorong Uni Eropa untuk melakukan kerjasama dengan Turki guna mengatasi dan mencegah masalah yang diakibatkan oleh pengungsi. Sehingga Uni Eropa mendorong perjanjian dengan Turki pada 2016, dengan memegang asas '*one-in-one-out*'. Artinya adalah bahwa para pengungsi yang berangkat dari/melalui Turki ke Yunani akan disaring terlebih dahulu. Pengungsi yang permohonan suakanya ditolak akan ditempatkan kembali di Turki. Sebagai timbal-balik, imigran yang telah mendapat status resmi pengungsi di Turki sebelumnya, akan diterima oleh Eropa tanpa memerlukan peninjauan kembali. Uni Eropa menetapkan kuota sebanyak 72 ribu pengungsi dari Turki (Islami N.M, 2019).

Pasukan pembebasan Suriah yang terdiri dari beberapa faksi oposisi berhasil merebut kendali kembali atas sebagian besar kota-kota penting pada awal Desember 2024. Pada Minggu dini hari, pasukan oposisi menyatakan bahwa Suriah terbebas dari kekuasaan Presiden Bashar al-Assad saat pasukan oposisi menyerbu ibu kota. Runtuhnya kekuasaan keluarga al-Assad yang mengejutkan selama lebih dari 53 tahun telah digambarkan sebagai momen bersejarah. Hampir 14 tahun setelah warga Suriah bangkit dalam protes damai terhadap pemerintah yang menanggapi mereka dengan kekerasan yang dengan cepat berubah menjadi perang saudara berdarah (AL-Jazeera, 2024). Berakhirnya kekuasaan Bashar al-Assad membuka jalan bagi para pengungsi yang meninggalkan negara ini pasca perang saudara untuk kembali ke negara asalnya. Sejak penggulingan mantan Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember 2025, menurut data terbaru dari Koordinator Kemanusiaan PBB. sekitar 1,2 juta warga Suriah telah kembali ke negara asal, termasuk 885.000 pengungsi di perbatasan dan 302.000 pengungsi di luar negeri. Setengah di antara pengungsi yang kembali dari luar negeri berasal dari Lebanon, Turki (22%) dan Irak (13%) kata Organisasi Internasional untuk Migrasi (AL-Jurdi, 2025).

Kerja sama yang dilakukan Turki dengan Uni Eropa dalam menghadapi krisis pengungsi dan ancaman imigrasi dari Timur Tengah terhadap

stabilitas kawasan Eropa, secara politis merupakan bentuk keengganan untuk menerima pengungsi dan imigran. Sehingga kerja sama dilakukan dengan motif melempar tanggung jawab ke negara lain. “Politik iba” sebuah konsep yang mencirikan banyaknya citra yang dibuat untuk menunjukkan bahwa suatu aktor memiliki kepedulian atas sebuah masalah. Politik iba juga seringkali digambarkan dengan keterikatannya akan unsur jarak. Pihak yang beruntung hanya bisa membantu melalui donasi dan kampanye, karena ketidakmampuannya dalam membantu secara langsung (fisik) (Hanafi, 2017). Berbeda dengan Uni Eropa, dalam hal ini Turki bertindak secara langsung menangani para pengungsi dan imigran. Terutama karena negara ini berada di jalur mobilitas antar benua, bertentangan dengan negara yang terlibat konflik. Dapat dilihat juga motif dari sisi kepentingan nasional Turki. Sebuah negara akan selalu mendasari sikap dan posisi yang diambil sesuai dengan kepentingan nasionalnya, baik langkah bekerja sama maupun langkah menutup diri (Waltz, 1959). Motif kepentingan nasional Turki dapat dilihat dari usaha negara ini untuk mendapatkan keanggotaan tetap Uni Eropa, sehingga dilakukan banyak pendekatan untuk dapat mencapai tujuan tersebut, termasuk kerja sama penanganan pengungsi dan imigran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berfokus pada analisis perkembangan yang terjadi di antara Turki dan Uni Eropa dalam Joint Action Plan. Terutama setelah berakhirnya perang saudara suriah yang mengakibatkan krisis pengungsi. Beberapa penelitian terdahulu membahas masalah yang bersinggungan dengan topik tersebut. Sebagaimana penelitian (Putri dkk, 2015) yang mengemukakan bahwa demonstrasi Suriah yang menjelma menjadi perang saudara berujung pada terjadinya krisis pengungsi. Pengungsi Suriah sendiri telah ditampung di Turki sejak awal konflik di tahun 2011. Pemerintah Turki memberlakukan kebijakan rezim perlindungan sementara bagi pengungsi Suriah yang dideklarasikan pada bulan Oktober 2011. Dengan diberlakukannya kebijakan rezim perlindungan sementara, pemerintah Turki menanggukhan batasan geografis yang sebelumnya menjadi ciri khas kebijakan suaka Turki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesediaan Turki dalam menerima pengungsi Suriah dilatarbelakangi oleh kepentingan Turki untuk mewujudkan perubahan rezim di Suriah.

Selanjutnya penelitian (Syafitri dkk, 2017) yang melihat bagaimana peran Turki dalam menangani pengungsi asal Suriah yang ada di dalam negeri selama 2014-2016. Konflik di Suriah yang dimulai pada tahun

2011, ketika terjadi unjuk rasa untuk menggulingkan rezim di Suriah dan menimbulkan kekerasan serta banyaknya korban jiwa dalam konflik tersebut membuat negara Suriah menjadi tidak stabil dan aman sehingga warga negara Suriah memilih untuk keluar dari negaranya dan masuk ke negara Turki sebagai pengungsi. Dalam hal ini, Turki membutuhkan bantuan dari negara-negara dan organisasi internasional dalam menangani masalah ini. Penelitian ini juga membuktikan bahwa upaya Turki dalam menanggulangi masalah pengungsi Suriah melalui kerja sama dengan negara-negara dan organisasi internasional sudah baik, kerja sama yang dilakukan oleh Turki antara lain dengan negara, PBB, dan Uni Eropa. Termasuk di dalamnya keterlibatan UNHCR, UNICEF, UNDP, IOM, WHO dan WFP. Dengan adanya kerjasama tersebut membuat Turki terbantu dalam menangani masalah pengungsi Suriah ini.

Kemudian penelitian yang menyorot sikap negara maju terhadap pengungsi. Sebagaimana penelitian (Islami, 2019) menemukan bahwa para pengungsi bermigrasi secara berkelompok dan mencari perlindungan ke negara-negara *north*, yakni negara yang dirasa menjanjikan. Mereka banyak bermigrasi menuju Arab, Kuwait, dan Qatar. Namun, penolakan justru terlihat dari sikap negara-negara *north*. Keengganan untuk menerima pengungsi mengalihkan gelombang migrasi ke Yordania, Turki, dan Lebanon yang kemudian menjadi penerima pengungsi terbesar. Keengganan *north* ditunjukkan juga dalam donasinya yang cenderung rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan fasilitas para pengungsi. Seiring dengan kompleksitas permasalahan pengungsi ini, muncul berbagai dampak negatif, baik bagi stabilitas tiga negara penerima terbesar, tatanan global, maupun bagi para pengungsi itu sendiri.

Terakhir penelitian oleh (Muftuler-Bac, 2021) menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, eksternalisasi tata kelola migrasi dan perlindungan eksternal perbatasan Eropa mendorong perancangan ulang rezim migrasi Turki. Eksternalisasi ini menghadapi ujian utama dengan adanya krisis pengungsi Suriah. Menunjukkan bagaimana dan sejauh mana kebijakan migrasi Turki berubah sebagai tanggapan atas kewajibannya untuk menyesuaikan diri dengan kriteria Uni Eropa sebagai negara yang mengaksesi, dan untuk menangani arus pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang datang dari Suriah. Korelasi yang erat dengan perubahan hukum dan proses akses Uni Eropa merupakan indikator penting dari difusi alat migrasi Uni Eropa ke negara-negara non-Uni Eropa, menciptakan jenis tata kelola migrasi yang baru, Perjanjian Penerimaan Kembali, Rencana Aksi Bersama, dan pernyataan Turki-

Uni Eropa tahun 2016 adalah alat kebijakan utama untuk eksternalisasi ini. Artikel ini mengungkapkan ketergantungan Uni Eropa pada perangkat migrasi yang komprehensif untuk mengelola perbatasan eksternal Uni Eropa dan eksternalisasi tata kelola migrasinya. Transformasi Turki merupakan contoh utama dari eksternalisasi ini. Menemukan kesimpulan bagaimana krisis Suriah menciptakan tantangan baru bagi Turki dan Uni Eropa dalam tata kelola migrasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melihat bahwa pokok permasalahan penelitian merupakan suatu masalah sosial yang memiliki kompleksitas tinggi. Paradigma post-positivisme menyatakan bahwa realitas sosial itu bersifat holistik, dinamis, dan interaktif (Sugiyono, 2012). Hubungan antara Turki dan Uni Eropa bersifat sangat dinamis. Sehingga penelitian ini mencoba melakukan analisis terhadap perkembangan salah satu perjanjian yang ada di antara keduanya terkait dengan penanganan imigran dan pengungsi dari Timur-Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif analitik. Dengan menerapkan pendekatan utama studi kepustakaan, sehingga memungkinkan penelitian terdahulu dengan topik yang relevan digunakan dalam penelitian ini (Sarwono, 2006). Proses pengumpulan data mencakup berbagai literatur buku dan artikel ilmiah, redaksi berita, serta dokumen resmi.

IV. PEMBAHASAN

Sejarah Uni Eropa

Uni Eropa sebagai sebuah organisasi supranasional di Eropa memiliki perjalanan yang panjang. Setelah Perang Dunia 2, berawal dari Komunitas Batubara dan Baja Eropa yang didirikan pada tahun 1951. Sebagai langkah pertama dalam mengamankan perdamaian abadi. Pada tahun 1957, Perjanjian Roma membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) dan era baru kerja sama yang semakin erat di Eropa. Namun, periode ini juga menyaksikan munculnya Perang Dingin yang memecah belah benua tersebut selama lebih dari 40 tahun. Perjanjian pada tahun 1965 yang menetapkan satu Dewan dan satu Komisi Komunitas Eropa ditandatangani di Brussels (berlaku sejak tahun 1967), yang merupakan hasil penggabungan ECSC, EEC, dan Euratom. Dengan demikian, Masyarakat Ekonomi Eropa memiliki satu badan administratif (Komisi) dan badan eksekutif (Dewan). Tak lama kemudian, pada tahun 1968, Uni Beacukai diluncurkan, di mana keenam negara anggota mengizinkan perdagangan lintas batas bebas

untuk pertama kalinya dengan menghapus beacukai. Hingga akhirnya Uni Eropa resmi menjadi bentuk saat ini pada tahun 1993.

Perang Saudara Suriah 2010-2024

Perang Saudara di Suriah dimulai dari sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar berusia 9-15 tahun di kota pada Maret 2011. Para pelajar tersebut ditangkap akibat menuliskan slogan-slogan kritik terhadap rezim partai Ba'ath yang berkuasa. Tindakan tersebut terinspirasi dari gerakan revolusi Musim Semi Arab (*the Arab Spring*) yang sukses menggulingkan pemerintahan Tunisia dan Mesir. Grafiti bertuliskan "Rakyat menginginkan rezim turun" ditanggapi oleh Kepolisian Suriah yang dikepalai oleh sepupu Presiden Bashar al-Assad dengan penangkapan para remaja. Tindakan kepolisian tersebut melahirkan gelombang protes masyarakat yang menuntut pembebasan para pelajar. Militer Suriah merespon protes itu secara berlebihan, militer mulai menembaki demonstran, mengakibatkan 4 korban jiwa. Tindakan militer itu tidak meredakan protes, sebaliknya protes semakin meluas dari kota Daraa menuju kota-kota pinggiran Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur (Muti'ah, 2012).

Demonstrasi menyebar dan secara sporadis terjadi di seluruh negeri. Pemerintah Suriah menyebarkan informasi yang menyalahkan konspirasi pihak asing serta ketegangan sektarian. Tindakan mengurai ketegangan dilakukan pemerintah dengan memberhentikan operasional kasino guna meredakan amarah Muslim konservatif, termasuk mencabut hukum tahun 2010 terkait pelarangan niqab, cadar, dan penutup wajah bagi guru perempuan. Peresmian festival Tahun Baru Noruz sebagai hari libur nasional juga dilakukan untuk menggaet simpati minoritas Kurdi. Usaha pemerintah suriah meredakan amarah masyarakat tidak berhasil. Protes terus berlanjut dan menyebar ke kota lainnya. Hal ini mengakibatkan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan Suriah. Pasukan keamanan mulai kembali menembaki demonstran di beberapa kota, mengakibatkan setidaknya 35 korban jiwa pada April 2011. Sebuah laporan lanjutan mencatat lebih dari 200 orang menjadi korban jiwa.

Kecaman internasional terhadap penggunaan senjata berlebihan oleh pasukan keamanan Suriah mulai bermunculan. Organisasi pemantau hak asasi manusia dan negara lainnya memberikan kecaman. Namun, pemerintah mengambil langkah-langkah guna mempertahankan kekuasaan politiknya. Pasukan keamanan melanjutkan

penggunaan kekerasan terhadap para demonstran. Presiden Assad menunjuk susunan kabinet baru, memberikan janji untuk melakukan reformasi politik dan mencabut hukum darurat. Di pertengahan April 2011, kabinet yang baru dibentuk mencabut Undang-Undang darurat serta membubarkan Mahkamah Agung Keamanan Negara. Peraturan baru yang mengharuskan masyarakat untuk mendapatkan izin kegiatan demonstrasi dari pemerintah dikeluarkan sebagai usaha membatasi gerakan protes. Menteri dalam negeri Suriah juga mendesak masyarakat untuk tidak melakukan aksi demonstrasi dan menyatakan bahwa demonstrasi akan terus dianggap sebagai sebuah ancaman nasional oleh pemerintah.

Gelombang protes yang ditanggapi dengan respon represif dari Pemerintahan Suriah berkembang menjadi perang saudara. Perang ini mendapatkan perhatian internasional, termasuk adanya intervensi dari pihak-pihak eksternal suriah. Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Suriah. Sanksi berupa pelarangan perjalanan, embargo senjata, serta pembekuan sejumlah aset milik pejabat Suriah yang dianggap terkait dan bertanggungjawab atas kekerasan dalam penanganan demonstrasi. Turki mengutuk keras penggunaan senjata berlebihan terhadap aksi protes rakyat sipil, setelahnya juga memberikan dukungan kepada para demonstran dengan menghimpun konferensi bagi para anggota fraksi oposisi Suriah. Pemerintahan Suriah di bawah Assad mendapatkan dukungan dari Iran dan Milisi Hizbullah Lebanon, dukungan selanjutnya juga datang dari Rusia. Sementara para penentang pemerintah mendapatkan dukungan dari negara-negara selain Turki seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Afghanistan.

Perang Saudara yang terjadi tidak hanya menggunakan senjata konvensional, berbagai senjata kimia yang dilarang dalam Hukum Perang turut pakai dalam perang ini. Pada tahun 2013, Assad secara luas dianggap bertanggung jawab atas serangan di Ghouta Timur. Insiden yang dikenal dengan Serangan Kimia Ghouta itu menewaskan 300 orang menurut para aktivis hingga 1.300 orang menurut aliansi oposisi utama. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mendapatkan informasi dari jaringan aktivis di seluruh Suriah yang kemudian mengatakan bahwa mereka telah mengonfirmasi sedikitnya 502 kematian (BBC, 2013). Para ahli senjata mengatakan bahwa sistem roket yang digunakan berasal dari gudang senjata tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah telah menggunakan senjata kimia. Rusia, sekutu utama Suriah, mengklaim bahwa serangan Ghouta dilakukan oleh pasukan oposisi yang mencoba mendorong intervensi militer asing. Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) menyalahkan pemerintah Suriah atas beberapa serangan kimia yang mematikan, yang

terbaru adalah serangan gas klorin tahun 2018 di Douma, daerah pinggiran Damaskus yang menewaskan 43 orang (Chehayeb & Albam, 2023).

Perang yang terjadi di Eropa timur akibat invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 berdampak besar pada pergolakan geopolitik dunia. Rusia mengalami stagnasi kemajuan pada perang tersebut, yang menguras sumber daya militer dan ekonominya. Selama tahun-tahun awal hingga pertengahan perang saudara Suriah. Pemerintah Rusia aktif terlibat dalam berbagai operasi militer penumpasan oposisi. Namun, di akhir fase perang tersebut intervensi militer Rusia di Suriah berkurang signifikan karena harus mengkonsentrasikan kekuatannya ke Ukraina. Eskalasi konflik di Timur Tengah juga terjadi akibat peningkatan kekerasan Israel terhadap penduduk Gaza, Palestina. Agresi militer Israel ke Gaza menimbulkan kecaman internasional akibat banyaknya korban jiwa serta blokade akses ke Gaza merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan berat. Pergolakan politik di seantero Timur Tengah juga terjadi menyusul perluasan agresi Israel ke Lebanon akibat campur tangan Hezbollah di Palestina, dan gelombang serangan pesawat nir-awak yang didalangi Iran terhadap Israel.

Fokus para sekutu Pemerintahan Suriah yang terpecah memberikan sebuah peluang bagi kelompok oposisi. Rezim Partai Ba'ath yang sudah puluhan tahun berkuasa di Suriah berhasil digulingkan. Dimulai November 2024, fraksi Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) beserta fraksi oposisi lainnya memulai kampanye ofensif berskala besar. HTS dan Pasukan Demokratik Suriah mulai memasuki Aleppo dan merebut sebagian besar kota, di tengah runtuhnya pasukan pro-pemerintah. Pihak oposisi mendapatkan kemajuan pesat dengan merebut puluhan kota dan berhasil merebut Hama di Suriah tengah pada awal Desember. Serangan ini memecah pasukan pro-pemerintah, mengakibatkan kemunduran wilayah kekuasaan Rezim Assad. Serangan kilat yang berhasil merebut kota Damaskus ke tangan oposisi membuat Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke negara sekutunya, Rusia. Salah satu titik balik terbesar bagi Timur Tengah dalam beberapa generasi, jatuhnya pemerintahan Assad melenyapkan benteng pertahanan yang menjadi tempat Iran dan Rusia menggunakan pengaruhnya di seluruh dunia Arab. Mikhail Ulyanov, duta besar Rusia untuk organisasi-organisasi internasional di Wina, melalui saluran Telegram mengkonfirmasi pemberian suaka kepada Assad dan keluarganya (Al-Khalidi & Azhari, 2024). Mengakhiri dominasi kekuasaan Partai Baath dan perang saudara.

Gelombang Pengungsi Suriah Pasca Arab Spring

Seperti diketahui, peristiwa Musim Semi Arab dimulai di Tunisia pada tahun 2011 dan segera menyebar ke Mesir, Yaman, Bahrain, Maroko, Suriah, Yaman, Libya, dan Suriah. Dalam kasus Suriah, apa yang dimulai sebagai demonstrasi damai di awal tahun 2011 berubah menjadi penindasan dengan kekerasan dan kemudian, sebagai gantinya, menyebabkan militansi yang lebih besar oleh para pembangkang di akhir 2011, dengan kekerasan menyebar ke seluruh negeri di lokasi-lokasi tertentu dari waktu ke waktu dan terus berlanjut di beberapa lokasi (Balcilar & Nugent, 2019). Perang Saudara Suriah bukan sekadar perebutan politik pemerintah dengan oposisi, melainkan juga sebuah krisis kemanusiaan. Jutaan penduduk Suriah meninggalkan negaranya sejak aksi demonstrasi terhadap pemerintah suriah ditanggapi dengan kekerasan yang berujung pada perang saudara. Selama 2011-2018, konflik di Suriah telah menyumbang lebih banyak pengungsi (5,5 juta) dan pengungsi domestik (lebih dari 11 juta) terhadap total pengungsi di dunia dibandingkan dengan negara lain. Lebih dari 60% dari 5,5 juta pengungsi Suriah (sekitar 3,38 juta) terdaftar di Turki pada tahun tersebut, semuanya tiba sejak tahun 2011 (Balcilar & Nugent, 2019).

Banyaknya pengungsi korban perang di suriah mendatangkan masalah bagi negara di sekitarnya. Masif nya jumlah pengungsi yang datang ke Turki mendapatkan respon negatif dari para warga lokal, hal tersebut karena peningkatan jumlah penduduk (termasuk pengungsi) mengurangi kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi warga lokal dan meningkatkan angka kriminalitas mengakibatkan sikap penolakan kehadiran para pengungsi (Amin dkk, 2025). Krisis pengungsi tidak hanya berdampak pada negara di sekitar, atau yang berbatasan langsung. Gelombang pengungsi juga menjadi masalah di negara-negara Eropa. Keterbukaan negara negara di Benua Eropa terhadap imigran mendorong pengungsi dari beberapa negara konflik di Timur Tengah dan Afrika berbondong-bondong memasuki Benua Eropa baik melalui jalur legal maupun ilegal, termasuk di antaranya adalah imigran asal Suriah. Hal itu menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di Turki.

Jumlah pengungsi Suriah di Turki semakin meningkat pasca adanya serangan udara oleh koalisi Pemerintah Suriah dan Rusia. Serangan tersebut terjadi di wilayah Idlib Suriah yang mengakibatkan semakin banyak orang meninggalkan negara ini. Pengungsi yang membludak di negara nya mendorong pemerintah Turki mengambil sikap tegas. Membiarkan pengungsi yang sudah tidak tertampung di negaranya untuk melintasi perbatasan ke negara-negara di Eropa. Berakibat pada gelombang pengungsi yang pergi menuju Yunani melalui jalur darat dan laut. Banyaknya permasalahan

akibat pengungsi dan imigran di Uni Eropa menimbulkan banyak penolakan dari warga lokal dan para politikus. Isu pengungsi kemudian menjadi bahan diskursus dalam berbagai persaingan politik di seluruh Eropa.

Kerangka Kerjasama Penanganan Pengungsi

Gelombang imigran datang ke Eropa selama tahun 2014 dan 2015 dengan skala yang masif, mereka masuk melalui Laut Mediterania dan Balkan. Laporan International Organization for Migration menyatakan bahwa lebih dari 2800 orang dilaporkan merenggang nyawa dalam usaha menyeberangi lautan dari total 3771 korban meninggal dunia di Mediterania selama tahun 2015 (IOM, 2015). Di bawah peraturan Uni Eropa yang dikenal sebagai peraturan Dublin, para pengungsi diharuskan untuk mengklaim suka di negara anggota tempat mereka pertama kali tiba. Namun beberapa negara Uni Eropa, seperti Yunani, Italia, dan Kroasia, telah mengizinkan orang untuk melintas yang sering kali melalui zona bebas paspor (Schengen) ke negara-negara yang berada di bagian utara. Memperjuangkan hak-hak migran miskin memang sulit karena iklim ekonomi masih suram, banyak orang Eropa yang menganggur dan waspada terhadap pekerja asing, dan negara-negara Uni Eropa terpecah dalam hal cara membagi beban pengungsi (BBC, 2016).

Uni Eropa mulai menawarkan sebuah kerja sama mengenai masalah pengungsi dengan Turki yang merupakan negara berbatasan langsung dengan Suriah. Turki mengajukan beberapa persyaratan untuk memulai kesepakatan kerja sama tersebut. Syarat-syarat seperti pembebasan visa bagi seluruh warga negaranya yang hendak melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa dan Uni Eropa harus mempercepat proses keanggotaan Turki untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Kedua pihak akhirnya menyepakati sebuah perjanjian melalui Joint Action Plan (EU, 2015). Kerja sama ini menjadi usaha dari Uni Eropa untuk mengurai permasalahan pengungsi asal Timur Tengah yang mulai membanjiri negara-negara anggotanya. Berdasarkan kesepakatan kerja sama, Uni Eropa meminta Turki untuk menampung pengungsi secara maksimal, terutama para pengungsi Suriah dengan jumlah lebih dari 3 juta jiwa untuk mencegah mereka memasuki wilayah eropa. Uni Eropa diwajibkan membantu Turki dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan dan layak bagi pengungsi selama menetap di negaranya. Bantuan sebesar 3 Miliar Euro juga dikumpulkan dari seluruh negara anggota UE untuk membantu Turki menangani pengungsi di negaranya (EU, 2015).

Joint Action Plan Turki dan Uni Eropa tidak berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan dan

ketidakselarasan antara kedua belah pihak terjadi dalam kerja sama tersebut. Turki pernah menuduh Uni Eropa terlambatan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, sementara sebaliknya Turki dituduh tidak berkomitmen pada prinsip dalam kerja sama tersebut dengan melonggarkan kontrol keamanan pada rute migrasi. Presiden Turki menyampaikan bahwa jika aliran pengungsi tersebut terus meningkat, maka akan memberikan tambahan beban. Sebuah peringatan juga diberikan kepada Uni Eropa bahwa Turki tidak akan memikul beban tanggungan tersebut sendiri, dengan ancaman akan mengizinkan pengungsi untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju negara-negara di Benua Eropa.

Dinamika Akses Keanggotaan Turki ke Uni Eropa

Sejak masih dalam bentuk European Economic Community (EEC), atau Masyarakat Ekonomi Eropa, Turki sudah berencana untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Permohonan pengajuan keanggotaan penuh secara resmi sudah diajukan pada bulan April 1987. Meskipun secara letak wilayah Turki sebagian besar ada di benua Asia, akan tetapi negara ini lebih senang untuk diidentikan sebagai bagian dari komunitas Eropa alih-alih Asia. Sikap ini dapat dilihat sejak kepemimpinan Presiden pertamanya yaitu Mustafa Kemal Atatürk yang memimpin Turki setelah runtuhnya Imperium Ottoman pada tahun 1923. Negara ini semakin intensif untuk membangun nilai-nilai Barat, termasuk dalam reformasi sistem pemerintahannya dari Konstitusi yang berdasarkan prinsip Agama menjadi Konstitusi yang berdasarkan prinsip sekularisme, pluralis, dan parlementer mengikuti perkembangan politik Barat (Lenczowski, 1956).

Komitmen untuk mengikuti nilai-nilai negara Barat tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dalam negerinya. Turki bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 1952 sebagai langkah menjalin hubungan yang lebih erat dengan Barat. Kontribusi Turki di beberapa organisasi internasional membawa negara ini lebih terbuka terhadap nilai-nilai Barat. Hal ini mendorong keinginan Turki untuk menjalin hubungan kerja sama ekonomi dengan negara di kawasan tetangganya, sehingga Turki mulai menjalin kemitraan perdagangan dengan Masyarakat Ekonomi Eropa pada 31 Juli 1959 (Sertoglu dkk, 2003).

Kemudian Turki mengajukan permohonan keanggotaan penuh pada 1987. Namun, ketika Masyarakat Ekonomi Eropa berubah ke dalam bentuk organisasi Uni Eropa, permohonan tersebut tetap tidak disetujui, sementara negara-negara lainnya diterima

menjadi anggota penuh Uni Eropa, termasuk juga negara yang tengah berseteru dengan Turki. Sebagai alternatif, Uni Eropa menawarkan status kemitraan khusus kepada Turki, namun tawaran tersebut ditolak. Dewan Eropa mensyaratkan beberapa hal untuk mendapatkan keanggotaan penuh sesuai dengan Kriteria Kopenhagen. Kriteria tersebut adalah hasil dari perjanjian European Community pada 1993. Beberapa persyaratan meliputi institusional yang stabil untuk menjamin keberlanjutan demokrasi, supremasi hukum, menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia juga perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dinamika negosiasi antara Turki dan Dewan Eropa memunculkan stagnasi dalam proses intergrasi negara tersebut ke Uni Eropa.

Krisis pengungsi akibat perang saudara Suriah yang berdampak kepada maraknya permasalahan imigran di Uni Eropa memberikan peluang bagi Turki. Meskipun negara ini turut mengalami kiris akibat pengungsi, terdapat potensi kerja sama yang bisa dilakukan dengan pihak Uni Eropa. Keengganan negara-negara Eropa untuk menerima para pengungsi menjadi peluang Turki untuk melakukan lobi-lobi negosiasi. Tawaran datang lebih dahulu dari Uni Eropa, mereka memberikan tawaran bantuan kepada Turki untuk memberikan bantuan kepada negara ini dalam penanganan pengungsi, dengan syarat yang diajukan agar para pengungsi tetap berada di Turki dan Uni Eropa akan memberikan kuota suaka bagi pengungsi yang sudah memenuhi syarat. Bantuan dana juga akan diberikan setiap tahunnya dan yang terpenting, Uni Eropa menyampaikan akan kembali meninjau permohonan keanggotaan penuh Turki yang sempat stagnan selama hampir tiga dekade. Akan tetapi perjalanan kerja sama penanganan pengungsi antara Turki dan Uni Eropa mengalami pasang surut dan ketegangan. Kedua pihak saling balas menuduh bahwa pihak lainnya melenceng dan tidak berkomitmen pada isi kesepakatan. Dinamika kerja sama tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada kemajuan, termasuk dalam hal peninjauan terhadap permohonan keanggotaan penuh Turki.

Pada tahun 2022 juga terdapat pergolakan geopolitik di Eropa Timur akibat invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Federasi Rusia. Termasuk Swedia dan Finlandia, kedua negara Skandinavia tersebut yang salah satunya memiliki perbatasan langsung dengan Rusia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sebagai negara anggota NATO, maka Turki memiliki hak suara untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Negara anggota Uni Eropa sebagian besarnya juga merangkap sebagai anggota pakta pertahanan

tersebut. Hal ini kemudian menjadi sebuah peluang untuk lobi-lobi Turki ke negara anggota Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa sudah menyetujui untuk kembali meninjau proses akses Turki dan kedua negara tersebut telah berhasil berintegrasi ke dalam NATO, keanggotaan penuh belum didapatkan oleh Turki.

Pasca Runtuhnya Rezim Ba'ath Suriah

Berakhirnya perang saudara di Suriah setelah keruntuhan Rezim Presiden Bashar al-Assad dari partai Ba'ath setelah mendominasi berkuasa di negara tersebut selama puluhan tahun. Krisis pengungsi yang sejak awal masa perang saudara membanjiri masalah imigran ke seantero Eropa mulai berkurang. Termasuk para pengungsi yang ditampung oleh Turki dan mendapatkan asistensi dari pihak Uni Eropa. Asistensi dalam bentuk kerja sama yang dilatar belakangi oleh motif untuk menghindari negara anggota Uni Eropa dari kewajiban menerima dan memberi perlindungan terhadap para imigran tentunya turut menyurut. Turki berulang kali tidak mendapatkan keuntungan yang sejajar dari kesepakatan nya dengan Uni Eropa. Termasuk dalam hal penerimaan Finlandia dan Swedia yang merupakan anggota Uni Eropa ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

V. KESIMPULAN

Gelombang migrasi akibat perang di suriah berdampak pada krisis pengungsi di Turki. Negara tersebut berada di jalur mobilitas antar benua Asia dan Eropa. Para pengungsi bermigrasi dari wilayah konflik di Timur Tengah menuju benua Eropa. Tentunya, mereka pergi melalui wilayah Turki. Gelombang migrasi tersebut kemudian menjadi masalah bagi negara-negara di Eropa. Menyadari bahwa para imigran menempuh jalur melalui Turki, Uni Eropa menawarkan kerja sama untuk menampung para pengungsi di negara tersebut. Beberapa syarat diberikan kepada Uni Eropa dan diterima, mereka juga berjanji akan kembali meninjau akses keanggotaan Turki untuk masuk menjadi anggota penuh di organisasi regional tersebut.

Kesepakatan diteken oleh kedua belah pihak dalam kerangka kerja Joint Action Plant. Kerja sama ini mengalami dinamika pasang surut hubungan kedua belah pihak. Baik Turki maupun Uni Eropa saling melempar tuduhan bahwa masing-masing pihak lainnya memiliki komitmen yang rendah, atau melenceng dari kesepakatan. Turki sempat memberikan ancaman untuk mengizinkan para imigran langsung menyebrang ke benua di utara mediterania tersebut. Padahal sejatinya, salah satu

motif yang mendorong Turki menerima kesepakatan tersebut adalah sebagai usaha mempercepat penerimaan keanggotaan penuh nya di Uni Eropa. Hal tersebut tentunya membawa stagnasi dalam hal penerimaan oleh negara-negara anggota Uni Eropa.

Sejatinya, masalah imigran korban perang saudara Suriah memberikan daya tawar dalam hubungan antara Turki dan Uni Eropa. Namun, kerja sama penanganan pengungsi yang berjalan sangat fluktuatif, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Sehingga daya tawar tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, hingga berakhirnya perang saudara di Suriah. Runtuhnya rezim partai yang sudah berkuasa puluhan tahun membuka jalan lebar bagi para pengungsi yang tertahan di Turki untuk kembali ke negara asalnya. Tentunya, hal ini akan sangat mengurangi krisis pengungsi yang sebelumnya terjadi dan menimbulkan masalah di benua Eropa. Penurunan krisis akan menurunkan daya tawar yang dimiliki oleh Turki, selama hampir 14 tahun krisis terjadi, keanggotaan Turki belum dapat dicapai. Berbeda dengan awal masa perang saudara Suriah, saat ini masalah gelombang imigrasi akibat perang tersebut bukan lagi menjadi hal yang vital bagi Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Jazeera. (2024, December 8). *What happened in Syria? How did al-Assad fall?* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2024/12/8/what-happened-in-syria-has-al-assad-really-fallen>
- [2] Alatas, M. (2020). *Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki*. Jurnal ICMES, 4(1), 86-102.
- [3] Al-Jurdi, W. (2025, March 24). *More than 1m uprooted Syrians have gone home since fall of al-Assad*. Euronews; Euronews.com. <https://www.euronews.com/2025/03/24/one-million-refugees-have-returned-to-syria-since-the-beginning-of-2025>
- [4] Al-Khalidi, S., & Azhari, T. (2024, 8 Desember). *Syrian rebels topple President Assad, his whereabouts unknown*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-rebels-celebrate-captured-homs-set-sights-damascus-2024-12-07/>
- [5] Amin, K., Sarmila, L. J., & Al Farauqi, M. D. A. (2025). *Dari Pintu Terbuka ke Repatriasi: Pergeseran Kebijakan Turkiye terhadap Pengungsi Suriah*. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 14(2), 201-226.

- [6] Balçilar, M., & Nugent, J. B. (2019). *The migration of fear: An analysis of migration choices of Syrian refugees*. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 73, 95-110.
- [7] Chehayeb, K., & Albam, O. (2023, 21 Agustus). *A decade after a sarin gas attack in a Damascus suburb, Syrian survivors lose hope for justice*. AP News. <https://apnews.com/article/syria-ghouta-chemical-attack-sarin-f3477f4a212a88e671634c10b9e17037>
- [8] Dina, Y. S. (2013). *Praha Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional*.
- [9] European Union (2015). *EU-Turkey Joint Action Plan*. di https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5860 tanggal 10 April 2020
- [10] Hanafi, S. (2017). *Gulf Response to the Syrian Refugee Crisis: Facts, Debates, and Fatwas*. Department of Sociology, Anthropology, and Media Studies, American University of Beirut.
- [11] International Organization for Migration. *IOM Counts 3,771 Migrant Fatalities in Mediterranean in 2015*. di <https://www.iom.int/news/iom-counts-3771-migrant-fatalities-mediterranean-2015>
- [12] Islami, N. M. (2019). *Keengganan Negara-negara North atas Pembagian Beban dalam Tata Kelola Pengungsi Global: Kasus Pengungsi Timur Tengah*. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(1), 44-56.
- [13] Islami, N. M. (2019). *Keengganan Negara-negara North atas Pembagian Beban dalam Tata Kelola Pengungsi Global: Kasus Pengungsi Timur Tengah*. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(1), 44-56.
- [14] Judt, T. (2005). *Postwar: A history of Europe since 1945*. Penguin.
- [15] Kusuma Putri, Amalia Zatalini, et al. (2015). *Kebijakan Turkiye Dalam Menampung Pengungsi Korban Perang Saudara Suriah Tahun 2011 - 2013*. *Diponegoro Journal of International Relations*, vol. 1(1) 1-14.
- [16] Lenczowski, G. (1956). *The Middle East in world affairs* (Vol. 4). Ithaca, NY: Cornell University Press.
- [17] Muftuler-Bac, M. (2021). *Externalization of migration governance, Turkey's migration regime, and the protection of the European Union's external borders*. *Turkish Studies*, 23(2), 290-316. <https://doi.org/10.1080/14683849.2021.1943661>
- [18] Muti'ah, S. (2012). *Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?*. *Jurnal CMES*, 5(1), 5.
- [19] Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [20] Sertoglu, K., & Ozturk, I. (2003). *Turkey and European Union Relations: Concept of Customs Union*. *Pakistan Horizon*, 56(3), 15-28. <http://www.jstor.org/stable/41394398>
- [21] Starr, S. (2012). *Revolt in Syria: Eye-witness to the Uprising*. Oxford University Press.
- [22] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [23] Syafitri, Maisyita, & Pazli Pazli. (2017). *Upaya Pemerintah Turki dalam Menanggulangi Pengungsi dari Suriah Tahun 2014-2016*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 4(2), 1-15.
- [24] *Syria chemical attack: What we know*. (2013, 24 November). BBC. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-23927399>
- [25] UNHCR. (2024). *Refugees*. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/refugees>.
- [26] Waltz, K. N. (1959). *Man, State, and War: A Theoretical Analysis*. Columbia University Press.
- [27] *Why is EU struggling with migrants and asylum?* (2016, 3 Maret). BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-europe-24583286>